BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi menjadi barang dan jasa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat (Widjayanti dan Wahidawati, 2015). Secara garis besar jenis perusahaan digolongkan atas perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tergabung pada Jakarta Islamic Index (JII) ini sebagai tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah.

Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berguna dalam proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Perusahaan yang baik yang melakukan pengungkapan

secara transaparansi. Terdapat dua sifat pengungkapan yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Pada perusahaan terdapat pernyataan mengenai informasi perusahaan yang semestinya dapat diakses oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Informasi dalam perusahaan dalam *mandatory disclosure* tersebut disempurnakan dengan adanya peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 yang berguna untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan emiten dan perusahan publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan dalam berinvestasi. Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah BAPEPAM (Ghozali dan Chariri, 2007: 393).

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut dipertegas pula dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan melakukan praktek pengelolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham (Alvionita dan Taqwa, 2015). Menurut Fauziah (2015) kepemilikan manajerial berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Lembaga-lembaga kepemilikan institusional ini berupa perusahaan reksa dana, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta, wakaf atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Menurut Alvionita dan Taqwa (2015) kepemilikan institusional berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Tugas utama komite audit yaitu mendorong diterapkannya *Good Corporate* Governance, terbentuknya suatu struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan, dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Maka dari itu komite audit diharapkan lebih cermat dan tepat dalam mengawasi manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan. Menurut Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) jumlah komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Adanya rapat komite audit yang rutin maka membuat perusahaan tersebut semakin jelas arah tujuan dan juga terciptanya transparansi dalam melakukan pengambilan keputusan. Dalam hal pengungkapan laporan keuangan juga akan semakin efektif apabila rapat komite audit dilaksanakan secara rutin dan dapat juga dipandang sebagai perusahaan yang terarah dengan baik. Menurut FCGI (2001) dalam Surpiyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) komite audit dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Menurut Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) jumlah rapat komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan, komisaris independen dalam praktiknya merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut Ayuso dan Argondana (2007) dalam Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) *independent director* lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan daripada *non-independent director* karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Hafiz M, Adriani, dan Chairina (2015) proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Dewan komisaris harus memiliki jadwal yang tetap dan rutin dalam pertemuan dalam rapat dewan komisaris. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi bagi para investor. Menurut Etteredge *et al.* (2010) dalam Widjayanti dan Wahidawati (2015) komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. Menurut Sutiyok dan Rahmawati (2014) jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yaitu Widjayanti dan Wahidawati (2015) menyatakan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2013 hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, sedangkan latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Menurut Utami, Suhardjanto, dan Hartoko (2012) menyatakan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010 hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory*

disclosure konvergensi IFRS, sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian serupa juga dilakukan menurut Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) menyatakan bahwa pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, sedangkan proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi anggota komite audit, dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Menurut Fauziah (2015) menyatakan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013 hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, sedangkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap

tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang telah dilakukan para peneliti terdahulu diantaranya yaitu: Widjayanti dan Wahidawati (2015), serta Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah variabel independen, objek penelitian, dan tahun penelitian yang dipakai pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian di atas. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memperngaruhi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang tergabung pada JII periode 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ”PENGARUH STRUKTUR DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI yang Tergabung pada JII Periode 2011-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
2. Apakah kepemilikan institusional akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
3. Apakah jumlah komite audit akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
4. Apakah jumlah rapat komite audit akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
5. Apakah proporsi komisaris independen akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*
5. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*
6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure.*

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.